

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Terjemahan M. Yusuf Musa. Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.
- Amin, Muhammad. *Ijrihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam Jilid IX*. Jakarta: Inis, 1991.
- Anggraini, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syari'iyah*. Yogyakarta: Maddah, 2000.
- Asnida, Susi. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Jambi, 2018)
- Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka setia, 2015
- Mahsun, Muhammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF, 2006.
- Maschab, Mashuri *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov, 2013.
- Moheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma, 1985.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Wali Pers, 1993.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika, 2018.

- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, tt.
- Sedarmayanti. *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Situmorang, M. dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Wirawan. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Zamani. *Manajemen*. Jakarta: IPWI, 1998.
- Zuhraini. *Buku Daras Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.

Skripsi dan Jurnal

- Anggraini, Fina. “Perspektif Fiqh Siyasaah Terhadap mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 21.
- Assegaf, Syarifah Devi Isnaini. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 4.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.
- Haryani, Dian. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, 2015).

Irwantoni. “Peran Siyasa Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama”.
Jurnal Al Adalah, Vol. X. 3 (Januari 2012)

Jamsen, Tri Anggraini. “ Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eekomolo Kabupaten Bombana,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

